

**PARADIPLOMASI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM
PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELALUI DIPLOMASI BUDAYA
BERBASIS PANTUN TAHUN 2017-2023**

Oleh:

Mimi Audia Zulha

NIM: 2105050001

Abstrak

Perubahan tatanan global mendorong pemanfaatan *soft power*, termasuk diplomasi budaya sebagai sarana interaksi antarnegara melalui seni, kuliner, film, dan tradisi lokal untuk mendukung *nation branding* dan kepentingan nasional. Pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan arah kebijakan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam memanfaatkan keragaman budaya sebagai alat diplomasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran paradiplomasi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam proses kebijakan terkait pengajuan pantun sebagai identitas bangsa, media penyelesaian konflik budaya, serta pengakuan internasional melalui UNESCO. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran website. Analisis yang digunakan yaitu, teori konstruktivisme dan paradiplomasi, serta konsep diplomasi budaya, *soft power*, *stakeholder*, dan *nation branding*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradiplomasi Pemerintah Kota Tanjungpinang cukup baik dalam memanfaatkan pantun sebagai media diplomasi budaya melalui festival, kolaborasi lintas budaya, dan promosi digital. Upaya ini memperkenalkan nilai-nilai Melayu secara internasional serta memperkuat hubungan budaya dengan negara serumpun seperti Malaysia. Namun, tantangan masih muncul terkait keberlanjutan, koordinasi lintas sektor, dan kebutuhan akan sinergi lebih kuat antar aktor lokal, regional, dan nasional dalam menghadapi pengaruh globalisasi budaya.

Kata kunci: Paradiplomasi, Pemajuan Kebudayaan, Diplomasi Budaya, Pantun, Soft Power

**PARADIPLMACY OF TANJUNGPINANG CITY GOVERNMENT IN
PROMOTING CULTURE THROUGH PANTUN-BASED CULTURAL
DIPLOMACY IN 2017-2023**

By:

Mimi Audia Zulha
NIM: 2105050001

Abstract

Changes in the global order encourage the utilization of soft power, including cultural diplomacy as a means of interaction between countries through art, culinary, film, and local traditions to support nation branding and national interests. The UU No. 5 of 2017 on the Promotion of Culture provides policy direction for the government and stakeholders in utilizing cultural diversity as a tool of diplomacy. This research aims to examine the role of paradiplomacy of the Tanjungpinang City Government in the policy process related to the submission of pantun as a national identity, a medium for resolving cultural conflicts, and international recognition through UNESCO. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through literature study, observation, interviews, documentation, and website searches. The analysis used is the theory of constructivism and paradiplomacy, as well as the concepts of cultural diplomacy, soft power, stakeholders, and nation branding. The results showed that the paradiplomacy of Tanjungpinang City Government good enough to utilized pantun as a medium for cultural diplomacy through festivals, cross-cultural collaboration and digital promotion. This effort introduces Malay values internationally and strengthens cultural relations with allied countries such as Malaysia. However, challenges still arise regarding sustainability, cross-sector coordination, and the need for stronger synergies between local, regional, and national actors in the face of the influence of cultural globalization.

Keywords: Paradiplomacy, Pantun, Cultural Diplomacy, Cultural Promotion, Soft Power